

## DEKEMBANGAN MODEL AKREDITASI SEKOLAH TINGKAT SLTP DAN SMU\*)

Oleh:

**S u m a r n o**

**Nur Kholis**

Universitas Negeri Yogyakarta

### Abstract

*This study was aimed at developing school accreditation model, covering the aspects of organization, working scheme, instrumentation, scoring system, and the determination of the accreditation standing. The instrument has been restricted to the essential elements so that schools can be expected to be able to evaluate themselves. It has been tried out at three Junior and three Senior High Schools in each of two provinces, the Province of Yogyakarta and the Province of Lampung. Those schools are the schools of high, medium, and low standing. The accreditation organization resulted consists of three levels, namely the School Accreditation Board, the Regional Accreditation Board, and the National Accreditation Board.*

*Keywords: accreditation model, school accreditation board, regional accreditation board, and national accreditation board.*

### abuluan

Salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional adalah kualitas sumber daya manusia di samping tersedianya sumber alam. Kualitas sumber daya manusia yang merupakan produk lembaga pendidikan atau pelatihan sangat menentukan perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial suatu negara. Pada

---

*Artikel bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh tim yang terdiri atas: Sumarno, Djemari Mardapi, Sukamto, Nur Kholis dan Bahrul Hayat.*

dasarnya, kompetisi pada era globalisasi, yang dikompetisikan adalah kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu sangat wajar apabila masyarakat menginginkan pemerintah menyediakan dana yang wajar dan proporsional untuk bidang pendidikan.

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan kualitas pendidikan adalah hasil Ebtanas. Laporan dari Depdikbud (1998) menunjukkan bahwa nilai NEM sekolah menengah pada lima tahun terakhir berfluktuasi namun berada pada kategori rendah, kecuali bidang studi Bahasa Indonesia dan PPKn. Keadaan ini merupakan indikasi bahwa usaha yang dilakukan pemerintah melalui pelatihan-pelatihan para guru-guru belum memberikan hasil yang baik.

Usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus didukung oleh semua pihak, termasuk para pengelola pendidikan di tingkat wilayah sampai pada tingkat sekolah. Kualitas pendidikan kita yang tergolong rendah harus bisa mendorong semua sekolah agar benar-benar ikut berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dibutuhkan informasi keadaan sekolah agar program yang direncanakan lebih tepat sasaran sehingga dapat dicapai hasil yang optimal. Oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan pendidikan pada semua jenis dan jenjang termasuk pendidikan menengah.

Ada lima komponen yang saling terkait dalam melaksanakan misi pendidikan, yaitu evaluasi, kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi. Evaluasi merupakan langkah awal dalam kegiatan perencanaan. Evaluasi adalah usaha menjaring informasi untuk mengetahui keberhasilan suatu program yang selanjutnya diputuskan untuk diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan.

Hasil dan kinerja sekolah selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan, dalam arti produk sekolah harus selalu berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu dituntut pula produk lembaga pendidikan harus memiliki iman dan taqwa yang memadai agar pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki dijamin untuk kesejahteraan masyarakat.

Persekolahan harus pula mengacu pada filosofi, visi, dan misi pendidikan nasional agar supaya perkembangan sekolah tidak lepas dari kerangka pencapaian tujuan-tujuan nasional. UU no 22 th 1999 dan PP no.25 th 2000 telah mengatur urusan pusat dan daerah termasuk dalam bidang pendidikan; peraturan ini menjamin bahwa meski dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah perlu dicegah jangan sampai terjadi perubahan yang merugikan atau membawa kemunduran.

Dewasa ini sedang dikembangkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (*school based management*) yang memberikan kesempatan kepada sekolah untuk secara otonom mengembangkan dan melaksanakan pendidikan sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan otonomi tersebut adalah kewenangan sekolah untuk menyusun program perbaikan kualitas pendidikan pada tingkat mikro, yaitu tingkat sekolah. Kewenangan ini penting, karena program perbaikan kualitas pendidikan harus dimulai dari tingkat bawah yaitu sekolah. Sekolahlah yang mengetahui masalah yang mereka hadapi, sehingga timbul program manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah.

Sebagai institusi publik yang berbasis masyarakat, sekolah harus dapat mempertanggungjawabkan mandat yang dipercayakan kepadanya; di sini berlaku prinsip akuntabilitas. Sekolah secara bertanggungjawab penuh melaksanakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tujuan yang disepakati masyarakat; di sinilah berlakunya prinsip kualitas dan efektivitas.

Pada era globalisasi masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kinerja dan hasil kerja sekolah. Hasil ini diperoleh melalui kegiatan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak intern ataupun pihak ekstern. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak intern disebut evaluasi diri, yaitu yang berujuan untuk memotret kinerja dan hasil yang dicapai oleh diri sendiri, yaitu sekolah. Potret inilah yang digunakan sebagai informasi untuk memperbaiki diri sendiri tanpa harus ada perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Kegiatan evaluasi diri ini dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Sekolah yang mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat untuk melaksanakan pendidikan, bukan hanya pengajaran, seharusnya memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan yang terbaik. Kuatnya motivasi intrinsik menunjukkan kemandirian dalam hal mutu, tidak hanya terdorong oleh kebutuhan melayani evaluator eksternal, tidak ada kebergantungan pada evaluator eksternal, akan tetapi sekolah memiliki kemandirian dan komitmen total untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu yang akseptabel. Perlu diingat bahwa kebutuhan mutu yang standar bersifat mutlak. Meskipun dalam sistem pendidikan yang desentralistis dan manajemen pendidikan berbasis sekolah sekalipun, sekolah senantiasa dituntut untuk melaksanakan proses pendidikan yang baik, menghasilkan tamatan atau lulusan dengan kualifikasi yang memenuhi standar nasional, regional, bahkan global.

Evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar sekolah dilakukan oleh badan yang independen yang disebut Badan Akreditasi. Badan ini bertugas untuk mengevaluasi kinerja dan hasil lembaga pendidikan. Hasil evaluasi Badan ini disampaikan ke sekolah dan masyarakat sebagai wujud akuntabilitas lembaga dan kebutuhan masyarakat. Jadi paradigma pendidikan yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kinerja sekolah meliputi, kualitas, otonomi, akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi.

Akreditasi yang telah dilakukan sampai saat ini adalah untuk sekolah swasta, namun hasilnya masih sering dipermasalahkan. Permasalahannya adalah kebenaran evaluasi yang dilakukan oleh tim akreditasi sekolah swasta. Bahkan akhir-akhir ini banyak tuntutan perlunya akreditasi bagi sekolah negeri demi untuk persamaan hak antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Kinerja dan hasil kerja sekolah harus tidak membedakan sekolah swasta dan negeri, dan untuk itu diperlukan seperangkat instrumen akreditasi yang berlaku untuk semua sekolah sejenis untuk negeri dan swasta.

Pelaksanaan akreditasi dilakukan dalam suatu periode tertentu, bisa tiga tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan sekolah. Masa berlakunya akreditasi juga perlu ditetapkan, karena sekolah yang tergolong akreditasi baik bisa menjadi kurang baik. Demikian sebaliknya sekolah yang semula kurang baik bisa menjadi baik. Oleh karena itu perlu ditentukan model akreditasi sekolah. Model ini meliputi lembaga pelaksana akreditasi, pelaksanaannya, dan pelaporannya.

Model akreditasi yang diajukan harus memiliki kekuatan hukum untuk bisa dilaksanakan. Kekuatan hukum ini berupa ketentuan yang menjadi pedoman pelaksanaan akreditasi sekolah. Pelaksanaan akreditasi ini bisa fleksibel dan bisa sangat ketat. Ketentuan yang fleksibel meliputi saat kesediaan sekolah untuk diakreditasi, dalam arti kata sekolah yang mengajukan untuk diakreditasi. Hasil akreditasi yang objektif dan disebarluaskan ke masyarakat akan mendorong sekolah-sekolah mengajukan diri untuk diakreditasi. Oleh karena itu diperlukan rumusan kebijakan pelaksanaan akreditasi sekolah.

Hasil akreditasi berupa laporan yang disampaikan ke sekolah-sekolah. Laporan awal yang berdasarkan data isian dari

sekolah merupakan hasil awal yang kemudian disampaikan ke sekolah-sekolah. Sekolah diberi hak untuk memberi komentar akan hasil akreditasi dari Badan Akreditasi. Apabila cukup banyak perbedaan hasil akreditasi dari Badan Akreditasi dan hasil evaluasi diri dari pihak sekolah, maka dilakukan kunjungan ke sekolah untuk mendiskusikan hasil akreditasi. Badan Akreditasi harus mengubah hasil evaluasinya bila ditemukan hal-hal yang bisa menaikkan atau menurunkan status akreditasi sekolah. Oleh karena itu laporan hasil akreditasi harus mencakup masalah yang penting yang menentukan kualitas pendidikan.

Oleh karena itu masalah-masalah yang perlu diteliti adalah: (1) bagaimana model akreditasi yang baik untuk sekolah jenjang SLTP dan SMU, termasuk di dalamnya adalah karakteristik (*traits*) objek akreditasi, mekanisme proses akreditasi, peran badan akreditasi, sekolah, dan pihak lain yang terkait; penentuan dan pemanfaatan hasil akreditasi. (2) bagaimana instrumentasi yang dibutuhkan untuk akreditasi sekolah tingkat SLTP dan SMU, sehingga dijamin diperolehnya data dan informasi yang strategis, objektif, akurat, serta dapat diandalkan sebagai dasar pertimbangan dan pembuatan keputusan. (3) bagaimana bentuk organisasi yang melakukan akreditasi di tingkat pusat dengan di tingkat daerah.

Akreditasi sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari *judgemental strategies* dalam evaluasi pendidikan (Worthen & Sanders, 1973: 127) di mana peran *professional judgement* menjadi ciri utamanya. Pertimbangan profesional ini terkait dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan objek akreditasi. Dalam hubungannya dengan sekolah sebagai institusi pelaksana pendidikan, komponen utamanya adalah mutu, efektivitas, dan akuntabilitas dari pendidikan yang dilaksanakannya.

Peningkatan kualitas pendidikan dan akuntabilitas, menurut Wolff (1994) merupakan tujuan kembar dari akreditasi dan penilaian. Keduanya menekankan pada proses dan masalah-masalah mengenai unjuk kerja dan standar pendidikan. Kegiatan akreditasi diawali dengan penilaian kinerja dan hasil kerja lembaga. Selanjutnya informasi ini digunakan untuk menentukan akreditasi suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja dan hasil kerja lembaga harus dilakukan melalui suatu prosedur yang sistematis dan baku.

Kondisi sekolah di Indonesia yang bervariasi memerlukan suatu dorongan untuk berbuat yang lebih baik dalam meningkatkan kinerjanya. Persaingan kualitas sumber daya manusia yang secara tidak langsung merupakan persaingan kualitas lembaga pendidikan membutuhkan evaluasi dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal ini disebut dengan Badan Akreditasi yang bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan sekolah itu sendiri mengenai kinerja dan hasil yang dicapai. Informasi dari Badan Akreditasi ini digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja dan hasil kerja sekolah.

Sesuai dengan semangat desentralisasi di mana sekolah bersama dengan masyarakat memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan pendidikan, idealnya dibutuhkan sistem akreditasi dengan ciri sebagai berikut.

- a. Terfokus pada ukuran strategis, atas mutu proses pendidikan, dan pencapaian hasil belajarnya; tidak harus mencakup semua informasi mengenai sekolah secara rinci.
- b. Model penilaian dalam sistem akreditasi tersebut sederhana namun merepresen-tasikan hal-hal yang substantif, bukan sekedar administratif.

- c. Mencakup indikator yang dapat diamati sehingga menjamin objektivitas data.
- d. Memungkinkan terjadinya self-evaluation (evaluasi diri), dan dengan verifikasi serta validasi eksternal oleh asesor akan terjadi proses pemberdayaan sekolah.

Akreditasi lembaga pendidikan pada dasarnya ingin mengetahui karakteristik suatu lembaga pendidikan termasuk sekolah-sekolah. Karakteristik sekolah dapat dijelaskan melalui informasi mengenai kondisi fisik, kualitas sekolah, personel sekolah, masyarakat sekitar sekolah, dan latar belakang sosial ekonomi siswa (Chantavanich, Chantavanich & Fry, 1990). Salah satu aspek yang selalu diperhatikan masyarakat adalah kualitas sekolah, sehingga aspek lain sering dianggap sebagai variabel yang mempengaruhi kualitas sekolah. Selain itu, pengembangan yang dilakukan sekolah memegang peranan penting dalam mencapai standar lulusan, sehingga aspek pengembangan dalam berbagai aspek perlu dijangkau datanya.

Badan kreditasi tidak hanya mengevaluasi aktivitas formal lembaga pendidikan namun juga menilai masalah administrasi, pembiayaan, layanan pada siswa, fasilitas, dan hubungan dengan masyarakat luar (NCACS, 1994). Objek yang dievaluasi tidak hanya pada hal-hal statis saja tetapi juga pada hal-hal yang dinamis, seperti pelaksanaan proses pembelajaran, sistem evaluasi hasil belajar, dan pemanfaatan fasilitas. Oleh karena itu instrumen yang digunakan untuk menjangkau data harus mencakup masalah-masalah fasilitas fisik yang ada serta pemanfaatannya.

Badan akreditasi yang telah ada di daerah adalah untuk sekolah-sekolah swasta. Oleh karena itu perlu dibentuk Badan Akreditasi untuk jenjang pendidikan sekolah menengah. Pembentukan Badan ini membutuhkan perangkat indikator kualitas sekolah yang meliputi masukan, proses, dan produknya. Masukannya berupa siswa, guru, dan fasilitas, dan prosesnya adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan sekolah, dan produknya atau lulusannya. Produknya dilihat pada kemampuan yang dimilikinya. Selain itu diperlukan informasi tentang pengelolaan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di sekolah.

Badan akreditasi membutuhkan instrumen untuk mengevaluasi sekolah-sekolah. Instrumen ini digunakan untuk menjangkau data sekolah dan teknik yang digunakan adalah angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dijangkau dengan instrumen tersebut dianalisis dan diperoleh hasil akreditasi. Hasil ini dianalisis untuk menetapkan tingkat akreditasi sekolah. Selanjutnya dikembangkan model akreditasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan SLTP dan SMU. Model ini harus melibatkan pihak yang independen yang mengetahui masalah pendidikan dan berpengalaman dalam bidang pendidikan. Independen dimaksudkan agar tidak terjadi bias dalam melaksanakan kegiatan akreditasi, karena pada dasarnya semua sekolah menginginkan sekolahnya tergolong baik, namun usaha yang dilakukan mungkin belum optimal sehingga hasilnya juga belum optimal.

Status terakreditasi menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi kriteria dan standar dari Badan Akreditasi (NCACS, 1994). Status akreditasi lembaga dapat diketahui oleh lembaga lain yang terkait dan masyarakat. Penentuan status lembaga pendidikan

atau sekolah berdasarkan hasil penilaian terhadap sejumlah indikator kinerja dan hasil kerja sekolah. Indikator ini meliputi visi sekolah, misi dan tujuan, pengelolaan program, kurikulum dan proses belajar mengajar, sumber daya manusia dan pengembangan, siswa, sarana dan prasarana serta pengembangannya, sistem evaluasi dan pembiayaan. Sembilan indikator ini digunakan sebagai pengembangan instrumen akreditasi.

Penilaian terhadap sekolah dapat dilakukan dengan cara pensekoran pada semua komponen yang dinilai. Hasil pensekoran yang berbentuk angka dapat dikategorikan menjadi tiga peringkat yaitu: maju, cukup dan kurang. Terakreditasi maju berarti bahwa sekolah tersebut bisa mandiri dan membina sekolah yang lain, sedangkan terakreditasi cukup berarti bahwa sekolah tersebut hanya bisa mandiri tetapi tidak bisa membimbing sekolah lain. Sekolah yang terakreditasi kurang memerlukan bimbingan dari sekolah lain yang terakreditasi maju.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Sistem Akreditasi

#### 1. Struktur dan Fungsi Organisasi Akreditasi

Mengenai sistem akreditasi sekolah tingkat SLTP dan SMU ini dirumuskan dua hal, pertama mengenai struktur organisasi, dan kedua prosedur akreditasi sekolah. Tabel berikut menggambarkan unit organisasi Badan Akreditasi Sekolah (BAS) di pusat dan di daerah dengan deskripsi ringkas fungsi masing-masing dan posisi sekolah sebagai objek akreditasi, sebagaimana tertera pada Tabel 1 berikut,

Tabel 1.  
Struktur Organisasi Badan Akreditasi Sekolah (BAS)

LEVEL	UNIT ORGANISASI	FUNGSI
NASIONAL	BASNAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan sistem akreditasi sekolah</li> <li>• Penetapan prosedur akreditasi</li> <li>• Penetapan standard penilaian akreditasi</li> <li>• Penyiapan BASDA</li> <li>• Sosialisasi sistem akreditasi</li> <li>• Pemantauan pelaksanaan akreditasi di daerah.</li> </ul>
DAERAH (Kabupaten/ Kotamadya)	BASDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggung-jawab dan koordinator pelaksanaan akreditasi sekolah di daerah</li> <li>• Penjabaran standard penilaian di daerah</li> <li>• Pemberian penjelasan, konsultasi, dan pembinaan ke sekolah.</li> <li>• Pemeriksaan dokumen akreditasi dari sekolah</li> <li>• Kunjungan ke sekolah secara selektif dalam rangka verifikasi dan konsultasi</li> <li>• Penilaian data akreditasi dari sekolah</li> <li>• Penetapan status akreditasi sekolah</li> <li>• Penyampaian keputusan status akreditasi ke sekolah</li> </ul>
SATUAN PENDIDIKAN	SEKOLAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan berkas dokumen dan isian akreditasi</li> <li>• Penyerahan berkas akreditasi ke BASDA</li> <li>• Konsultasi dengan BASDA</li> <li>• Melakukan perbaikan berkas akreditasi</li> <li>• Penerimaan status akreditasi</li> <li>• Peningkatan berkelanjutan kapasitas kelembagaan sekolah</li> </ul>

**Catatan:**

Sebagai organisasi yang dituntut mampu melaksanakan fungsinya secara profesional, Badan Akreditasi Sekolah ini bersifat independen, dan di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, swasta, pakar, dan LPTK.

## 2. Keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah

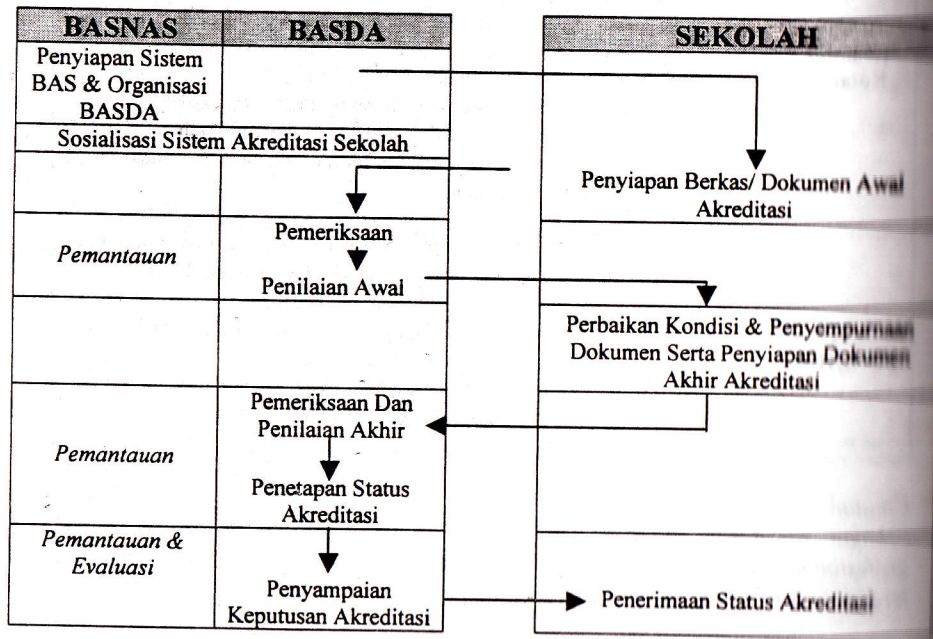
Badan Akreditasi Sekolah di tingkat pusat dan daerah terdiri dari unsur-unsur:

- Pemerintah: di pusat wakil dari Depdiknas; di daerah wakil dari Dinas atau bentuk lain yang mengurus pendidikan.
- Swasta: adalah yayasan pemilik atau penyelenggara sekolah.
- Sekolah: perwakilan sekolah negeri dan swasta.
- Ahli pendidikan dari perguruan tinggi dari LPTK.

### Prosedur Akreditasi

#### 1. Prosedur Operasi Akreditasi Baku

Akreditasi sekolah mengikuti proses sebagaimana tertuang dalam diagram berikut.

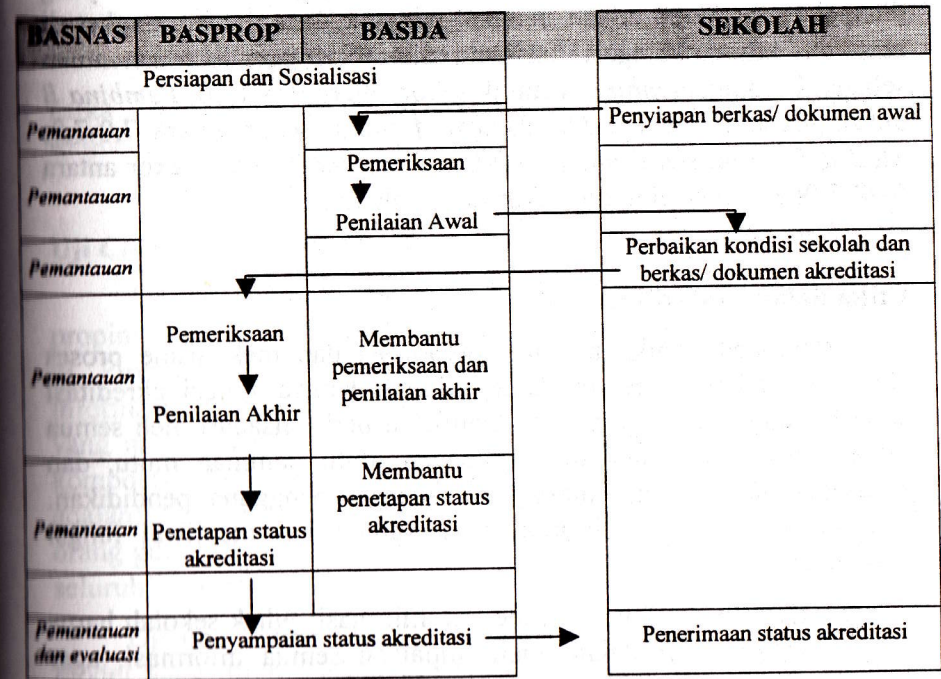


Gambar 1.  
Prosedur Operasi Akreditasi Baku

Diperkirakan dari langkah awal penyiapan berkas oleh sekolah sampai dengan diperolehnya hasil akreditasi memerlukan waktu 6 (enam) bulan.

#### 2. Prosedur Operasi Akreditasi Masa Transisi

Dalam masa transisi ini fungsi pemeriksaan dan penilaian akhir, serta penetapan status akreditasi dilakukan oleh BASPROP atau Koordinator BASDA; sedangkan BASDA dalam peran membantu sekaligus proses magang, sebelum akhirnya dipercaya untuk berfungsi secara mandiri.



Gambar 2.  
Prosedur Operasi Akreditasi Masa Transisi

### Aspek-Aspek dan Kategori Kreditasi Sekolah

Aspek-aspek yang diakreditasi dengan besarnya pembobotan adalah sebagai berikut: fasilitas dan pemanfaatannya (15%), sumber daya manusia (25%), orangtua siswa dan masyarakat (15%), arus siswa (20%), iklim sekolah (25%). Kelima komponen tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah indikator yang mencakup aspek-aspek input, proses, dan hasil. Informasi yang diperlukan akan dijabarkan dengan enam instrumen dalam bentuk angket. Keenam angket tersebut masing-masing untuk: sekolah, kepala sekolah, tata-usaha, guru, siswa, orangtua siswa.

Kategori akreditasi ditentukan berdasarkan skor yang dicapai yang dikumpulkan dengan menggunakan keenam angket di atas. Penentuan kategori hasil akreditasi menggunakan ketentuan sebagai berikut: *Pembina A* untuk skor antara 9,0-10,0; *Pembina B* untuk skor antara 8,0-8,9; *Madya A* untuk skor antara 7,0-7,9; *Madya B* untuk skor antara 6,0-6,9; *Pratama A* untuk skor antara 5,00-5,9; *Pratama B* untuk skor di bawah 5,0.

### Etika dalam Akreditasi

Betapapun baiknya diatur organisasi dan mekanisme proses akreditasi sekolah, belum dapat dijamin bahwa fungsi akreditasi akan berlangsung dengan baik. Untuk itu perlu disadari oleh semua pihak bahwa akreditasi terkait dengan mutu, jaminan mutu, dan sekaligus perlindungan masyarakat sebagai pengguna pendidikan. Berikut beberapa contoh nilai etika yang harus menjwai fungsi akreditasi:

- a. *Kejujuran* dalam pemberian informasi; pihak sekolah harus secara jujur dalam menyampaikan semua informasi, agar supaya tidak terjadi keputusan yang menyesatkan.

- b. *Keterbukaan* tentang pedoman akreditasi; Badan Akreditasi Sekolah senantiasa transparan mengenai kriteria dan prosedur penilaian akreditasi ini.
- c. *Keadilan* dalam penerapan pedoman akreditasi; sejalan dengan prinsip keterbukaan, Badan Akreditasi sekolah juga akan memperlakukan semua sekolah yang mengajukan penilaian akreditasi secara adil, semua kriteria berlaku sama untuk semua sekolah yang berada dalam wilayah kerjanya.
- d. *Keunggulan* mutu sebagai sesuatu yang selalu ingin diwujudkan; motivasi intrinsik yang mendorong penilaian akreditasi seharusnya adalah dalam rangka mewujudkan pendidikan yang unggul; bukan sebatas hanya untuk memperoleh status akreditasi.

Etika 4K tersebut harus dipegang teguh oleh semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi sekolah.

### Uji Coba Model Akreditasi

Ujicoba model dilakukan di tiga SMU dan tiga SLTP di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tiga SLTP dan tiga SMU di Propinsi Lampung. Tiga sekolah yang dipilih berdasarkan informasi dari Kantor Dinas Pendidikan DIY dan Lampung, yaitu yang mewakili sekolah yang paling baik, baik, dan kurang. Jumlah komposisi dan responden yang digunakan untuk ujicoba model adalah: 12 orang kepala sekolah, 12 orang kepala tata usaha, 114 orang guru, 180 orang siswa, dan 180 orang orang tua siswa. Jumlah seluruh responden ujicoba model adalah 510 orang.

Ujicoba model bertujuan untuk menentukan sejauh mana model yang direncanakan ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan indikator sebagai berikut: (1) keterbacaan dan kemudahan pengisian instrumen; (2) kebenaran



data isian; (3) kemudahan memahami pedoman akreditasi yang mencakup: Pedoman Umum, Pedoman Pengisian Instrumen, Pedoman Pensekoran dan Penetapan Status Akreditasi, Pedoman Pembuatan Laporan Hasil Akreditasi; (4) kesesuaian hasil akreditasi dengan penilaian dari Kantor Dinas Pendidikan dan persepsi masyarakat.

Hasil ujicoba model untuk 3 SLTP dan 3 SMU di Propinsi DIY menunjukkan adanya variasi skor tiap aspek utama antar sekolah. Berdasarkan urutan skor hasil akreditasi SLTP mulai yang terbaik adalah SLTPN 5 Yogyakarta, SLTPN 1 Depok, dan SLTPN 3 Kasihan.. Untuk tingkat SMU urutan skor hasil akreditasi mulai yang terbaik berturut-turut adalah SMUN 1 Yogyakarta, SMUN 9 Yogyakarta, dan SMUN 1 Ngaglik. Demikian pula menurut Kantor Dinas Pendidikan dan penilaian masyarakat, untuk tingkat SLTP, berturut-turut dari yang terbaik adalah SLTPN 5 Yogyakarta, SLTPN 1 Depok, dan SLTPN 3 Kasihan. Sedangkan untuk tingkat SMU berturut-turut adalah SMUN 1 Yogyakarta, SMUN 9 Yogyakarta, dan SMUN 1 Ngaglik. Jadi hasil akreditasi sekolah ini konsisten dengan urutan sekolah menurut Kantor Dinas Pendidikan DIY dan juga sesuai dengan pendapat masyarakat.

Hasil ujicoba model untuk 3 SLTP dan 3 SMU di Propinsi Lampung menunjukkan adanya variasi skor tiap aspek utama antar sekolah. Berdasarkan urutan skor hasil akreditasi tingkat SMU urutan skor hasil akreditasi mulai yang terbaik berturut-turut adalah SMUN 9 Bandar Lampung, SMUN 1 Metro, dan SMUN 1 Gedong Tataan. Untuk tingkat SLTP mulai yang terbaik adalah SLTPN 1 Metro, SLTPN 16 Bandar Lampung, dan SLTPN 1 Gedong Tataan. Demikian pula menurut penilaian masyarakat, untuk tingkat SMU, berturut-turut dari yang terbaik adalah SMUN 9 Bandar Lampung, SMUN 1 Metro, dan SMUN 1 Gedong Tataan. Sedangkan untuk tingkat SLTP urutannya adalah SLTPN 1 Metro, SLTPN 16 Bandar Lampung, dan SLTPN 1 Gedong Tataan. Jadi hasil akreditasi

sekolah ini konsisten dengan urutan sekolah menurut Kantor Dinas Pendidikan DIY dan juga sesuai dengan pendapat masyarakat.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian pengembangan model akreditasi sekolah ini adalah:

1. Bentuk organisasi yang cocok adalah Badan Akreditasi Sekolah (BAS) yang ada pada tingkat nasional (BASNAS) dengan fungsi pokok pembakuan sistem dan pengawasan pelaksanaan; dan pada tingkat daerah (BASDA) sebagai pelaksana dengan kewenangan sampai pada penentuan status akreditasi sekolah;
2. Prosedur akreditasi yang direkomendasikan adalah bahwa sekolah menerima berkas akreditasi dari BASDA, diisi dan dilengkapi dengan dokumen yang relevan kemudian mengembalikannya ke BASDA, mendapatkan umpan balik, bila perlu dilakukan visitasi; baru setelah informasi dipandang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dilakukan penentuan status akreditasinya. Klasifikasi status akreditasi berdasarkan skor akhir yang diperoleh adalah 9,00-10,00 (Pembina A); 8,00-8,99 (Pembina B); 7,00-7,99 (Madya A), 6,00-6,99 (Madya B); 5,00-5,99 (Pratama A); dan kurang dari 5 (Pratama B).

### **Saran**

Dalam batas-batas kesempatan yang ada penelitian ini telah diusahakan dengan sebaik-baiknya, namun tidak tertutup kemungkinan masih terdapat beberapa kelemahan. Sebagai kegiatan penelitian dan pengembangan, hasil yang dicapai ini masih sangat awal meskipun sudah menyentuh hal-hal; yang sangat mendasar. Misalnya konsep Badan Akreditasi Sekolah (BAS) dipandang perlu ada pada tingkat daerah, di samping pada tingkat nasional. Hal ini

sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Dari segi instrumentasinya, telah dipakai prinsip efektivitas artinya betul-betul dapat mengenali karakteristik sekolah; dan prinsip efisiensi artinya pengumpulan data dibatasi pada aspek-aspek yang strategis saja.

Implementasi model akreditasi yang dihasilkan penelitian ini membutuhkan persiapan yang menyeluruh meliputi aspek-aspek organisasi dan tatakerja operasional, personel, pembiayaan, administrasi pendukung, dan sekolah juga perlu dipersiapkan dengan kompetensi evaluasi diri yang profesional.

Masih banyak hal yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil awal pengembangan model akreditasi sekolah tingkat SLTP dan SMU ini. Mudah-mudahan sistem akreditasi ini cepat direalisasikan mengingat sistem jaminan mutu sekolah sudah sangat dibutuhkan dewasa ini.

#### Daftar Pustaka

- Arcaro, J.S. (1995) *Quality in education: An implementation Handbook*. Delray Beach, FL: St. Luice Press.
- Bogue, E.G. & Sanders, R.L. (1992) *The evidence for quality*. San Francisco: Josey-Bass Publishers.
- Chantavanich, A., Chantavanich, S., & Fry, G.W. (1990). *Evaluating Primary education*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Cronbach, L.J. (1963). Course improvement through evaluation", *Teachers College Record*, 64. 672-683.

Depdikbud. (1996). *Kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang 1996-2005*. Jakarta: Depdikbud.

Depdikbud. (1998). *Hasil evaluasi pelaksanaan program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdikbud.

North Central Association of Colleges and Schools (NCACS). (1994). Assesment program evaluation. Dalam J.S. Strak & A. Thomas (Eds.). *A Handbook of Accreditation*. Needham Heights: Simon & Schuster.

*Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom*.

Squires, D.A. & Huitt, W.G. & Segers, J.K. (tth). *Effective schools and classrooms: A Research based Perspective*. Alexandria, VA: ASCD

Stufflebeam, D.L. et al. (1971) *Education evaluation and decision making*. Itasca: Peacock.

Tyler, R.W. (1950). *Basic principle of curriculum and instruction*. Chicago: Chicago University Press.

Wiles, J. & Wondi, J. (1986). *Supervision: A guide to practice*. (2<sup>nd</sup> ed). Columbus, OH: Charles E. Merrill.

Windham, D.M. *Indicators of educational effectiveness and efficiency*. Albany NY: IEES Project, SUNY

*Pengembangan Model Akreditasi Sekolah Tingkat SLTP dan SMU*

Wolff, Ralph A. (1994). *Assesment and accreditation: A shotgun marriage?* dalam Stark, J. S. & Thomas, Alice (Ed. 1994). *Assesment program evaluation*. Needham Heights: Simon & Schuster Higher Education Publishing Group.

Worthen and Sanders (1973). *Educational evaluation: Theory and practice*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc.